

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: RICHARD ARNALDO, SE., MSA.

Jabatan

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: H. RUSDY MASTURA

Jabatan

: Gubemur Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan:

 Mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinega tersebut menjadi tanggungjawab kami.

 Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu. Februari 2023

PIHAK KEDUA,

H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA,

RICHARD ARNALDO, SE., MSA. NIP. 19821123 200604 1 007

No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	- Indeks reformasi Birokrasi	- 64		
2	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	- Kontribusi PDRB sektor perdagangan	- 6.90%		
	- Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	- Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	- 5.849,88 Juta USD		
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	- 4-6 %		
		- Inflasi pangan bergejolak	- 3-5%		
3	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	- Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	- 12.00%		
	- Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	- Nilai ekspor produksi industri non-migas	- 1.646 Juta USD		
		- Jumlah tenaga kerja di sektor industri	- 68.000 Jiwa		
		- Cakupan bina pelaku IKM	- 11-14%		

Program			Ang	garan	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Permerintahan Daerah Provinsi	=	Rp.	18,676,956,138	APBD
2.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	=	Rp.	309,763,100	APBD
3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	=	Rp.	170,080,450	APBD
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	=	Rp.	3,009,921,500	APBD
5.	Program Pengembangan Ekspor	=	Rp.	643,876,800	APBD
6.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	=	Rp.	2,073,894,383	APBD
7.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	=	Rp.	280,974,900	APBD
8.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	=	Rp.	3,371,690,698	APBD
9.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	=	Rp.	274,429,950	APBD
10.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	=	Rp.	279,049,700	APBD
11.	Program Perdagangan Dalam Negeri	=	Rp.	484,905,000	APBN
12.	Program Perdagangan Luar Negeri	=	Rp.	239,064,000	APBN
13.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	=	Rp.	1,346,610,000	APBN

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH

H. RUSDI MASTURA

ER

Palu, 7 Februari 2023

KEPALA DINAS PERINDUATRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SYLAWESI TENGAH

RICHARD ARNALDO, SE., MSA

Pembina Otama Muda NIP. 19821123 200604 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE

Jabatan

: Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

: RICHARD ARNALDO SE., M.SA

Jabatan

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PERTAMA, SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH, SE NIP. 19661028 199203 2 010

PIHAK KEDUA, KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROYNSTAULAN ESI TENGAH

> RICHARD ARNALDO SE., M.SA NIP. 19821123 200604 1 006

No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
	- Meningkatnya Kualitas tata kelola penyelengaraan urusan Pemerintahan	- Nilai Sakip		B Indeks
		- IKM	-	B Indeks Kepuasar Masyarakat
		- Presentase Realisasi Anggaran		90%

= Rp. 16,447,150,467 APBD Hi. MAHNILA JÖTÖL EMBAH SE Nip. 19661028 199203 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDDY SUARMAN, SE., MM

Jabatan : Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

: RICHARD ARNALDO SE., M.SA

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberjan penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK KEDUA, KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

> ARNALDO SE., M.SA NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA. KEPALA UPTD PELAKSANAAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

> DEDDY SUARMAN, SE., MM NIP. 19691109 199903 1 006

No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Kualitas tata kelola penyelengaraan urusan Pemerintahan Bidang	- IKM	B Indeks Kepuasan Masyarakat
		- Presentase Realisasi Anggaran	90%
-	Terlaksananya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	90%

Program			Ang	garan	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	-	Rp.	404,633,815	APBD
2	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen		Rp.	1.454.830.150	APBD

KEPALA OTAS JERINDUSTRIAN DAN

RICHARD ALVALDO, SE., MSA NIP. 19821123 200604 1 006

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PERTAMA KEPALA UPTD PELAKSANAAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

DEDDY SUARMAN, SE., MM Nip. 19691109 199903 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM

Jabatan : Kepala UPTD PSMB

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RICHARD ARNALDO SE., M.SA

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK KEDUA, KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINST SET AWEST TENGAH

NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA, KEPALA UPTD PSMB PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM NIP. 19780420 201001 2 005

No		TUJUAN/SASARAN PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM		TARGET
(1)		(2)		(3)		(4)
		Meningkatnya Kualitas tata kelola penyelengaraan urusan Pemerintahan Bidang		IKM		B Indeks Kepuasan Masyarakat
			-	Presentase Realisasi Anggaran		90%
	-	Terlaksananya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	-	Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi	-	3%

Program			Angga	ran	Keterangan
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	-	Rp.	827,499,286	APBD
2.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen		Rp.	619,064,233	APBD

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PERTAMA KEPALA UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM Nip. 19780420 201001 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama

: HAPIT TOLLA, SE

Jabatan

: Plt. Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: RICHARD ARNALDO SE., M.SA

Jabatan

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK KEDUA, KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSESULAMEST TENGAH

> RICHARD ARNALDO SE., M.SA NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA. PLT. KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

> HAPIT TOLLA,SE NIP. 19731121 200701 1 009

No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Kualitas tata kelola penyelengaraan urusan Pemerintahan Bidang	- IKM	B Indeks - Kepuasan Masyarakat
		- Presentase Realisasi Anggaran	- 90%
	Terwujudnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Persentase Layanan IKM	- 100%
-			

Program			Ang	garan	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	-	Rp.	997,672,570	APBD
2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Rp.	1,003,341,698	APBD

TAH PRODU

PIHAK PERTAMA PLT. KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN KERAJINAN DAERAH

Palu, 13 Februari 2023

HAPTT TOLLA SE NIP. 19731121 200701 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: IRWANSYA, SH, MH

Jabatan

: Kepala Bidang Fasilitasi Dan Informasi Industri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: RICHARD ARNALDO SE., M.SA

Jabatan

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK KEDUA, KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSISULAWESI TENGAH

> RICHARD ARNALDO SE., M.SA NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA, KEPALA BIDANG FASILITASI DAN INFORMASI INDUSTRI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSTSULAWESI TENGAH

IRWANSYA, SH, MH NIP. 19650622 199603 1 003

No		TUJUAN/SASARAN PROGRAM INDIKATO		INDIKATOR PROGRAM	TARC	
(1)		(2)		(3)		(4)
1	-	Terwujudnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	-	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	-	100%
	Keg	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-	Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		1 Dokumen
	Sub.keg	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan		1 Dokumen
	Sub.keg	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	-	1 Dokumen
	Sub.keg	Terlaksananya Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana		1 Dokumen
2	-	Tercapainya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	-	Persentase data Industri yang terdaftar dalam SIINas	-	64%
	Keg	Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem		1 Dokumen
	Sub.keg	Terlaksananya Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	,	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi	-	1 Dokumen
	Sub.keg	Terlaksananya Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	-	1 Dokumen
	Sub.keg	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	9	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	-	1 Dokumen

Program			Ang	garan	Keterangan
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	-	Rp.	1,378,156,950	APBD
Keg	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-	Rp.	1,378,156,950	
Sub.keg	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	Rp.	429,691,150	
Sub.keg	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	Rp.	822,999,700	
Sub.keg	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	=	Rp.	125,466,100	

Sub.keg Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri

Penyampaian Data ke SIINas

279,049,700 = Rp. 64866000 = Rp. 113982500 = Rp. 100201200

279,049,700

APBD

= Rp.

PIBAK KEDUA KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam

RICHARD ARMALDO, SE., MSA NIP. 19821123 200604 1 006

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PERTAMA KEPALA BIDANG FASILITASI DAN INFORMASI

> IRWANSYA, SH, MH Nip. 19650622 199603 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: MIRA YULIASTUTI, ST.MP

Jabatan

: Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Industri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: RICHARD ARNALDO SE., M.SA

Jabatan

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PERTAMA, KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

> MIRA YULIASTUTI, ST.MP NIP. 19730831 200012 2 002

RICHARD ARNALDO SE., M.SA

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWEST ENGAH

NIP. 19821123 200604 1 006

No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM INDIKATOR P		INDIKATOR PROGRAM TARGET
(1)		(2)	(3)
1		Terwujudnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan - 100% industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
	Keg	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi - 1 Dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi - 1
	Sub-keg	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan
	Sub.keg	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya - 2 Dokumen
	Sub.keg	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan - Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta - 1 Dokumen Masyarakat
2	-	Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki - 100% - 100%
	Keg	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	- Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Pertuasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Pertuasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
	Sub.keg	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar, dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam I (Satu) Provinsi
	Sub.keg	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi

Program			Angga	iran	Keterangan
1. Keg	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana	=	Rp.	990,192,050	APBD
Sub.keg	Pembangunan Industri Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	=	Rp.	53,646,000	
Sub.keg	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	Rp.	239,941,150	
Sub.keg	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	=	Rp.	696,604,900	

Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Keg Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan
Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri
(IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)

Kewenangan Provinsi

Sub.keg Fasilitasi Pernenahan Komitmen perolehan IUI, IPUI,

IUKI, dan IPKI

IUKI, dan IPKI

IUKI, dan IPKI
Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem
Pelayanan Pertzinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik
Sub.keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di
Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI
Kewenangan Provinsi

PHAK KEDUA KEPALA DAN PERDAGANGAN ERINDUSTRIAN NIP. 19821123 200604 1 006

274,429,950 274,429,950 = Rp.

125351950

149078000 = Rp.

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PERTAMA KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

APBD

MIRA YULIASTUTI, ST.MP Nip.19730831 200012 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: FAJAR SETIAWAN, SE, MM

Jabatan

: Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: RICHARD ARNALDO SE., M.SA

Jabatan

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK KEDUA, KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SPLAWEST TENGAH

RICHARD ARNALDO SE., M.SA NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA, KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

19830304 200112 1 004

No		TUJUAN/SASARAN PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM		TARGET
(1)		(2)		(3)	F	(4)
1	-	Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	-	Persentase penerbitan SKA	-	100%
	Keg	Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah	-	Jumlah Annual Report Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi		1 Laporan
	Sub.Keg	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	,	Jumlah dokumen penerbitan Surut Keterangan Asal		1 Dokumen
2	-	Terwujudnya Pengembangan Ekspor	-	Nilai ekspor	-	9634,00 Juta USD
	Keg	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-	Jumlah Annual Report Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari I (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam		1 Laporan
	Sub Keg	Terlaksananya Pameran Dagang Internasional/Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		3 Pelaku Usaha
	Sub.Keg	Terlaksananya Pameran Dagang Lokal	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi	1	24 Pelaku Usaha
	Sub-Keg	Terlaksananya Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Duenth yang	-	2 Produk
	Sub Ken	Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	-	Jumlah Pelaku Usaha Eksper yang Dibina	4	10 Pelaku Usaha

Program			Ang	garan	Keterangan
I. Keg Sub.Kej	Program Perizinan dan Pendaflaran Perusahaan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	:	Rp. Rp. Rp.	236,954,000 236,954,000 236,954,000	APBD
Sub Kej Sub Kej	Program Pengembangan Ekspor Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang Internasional/Nasional Pameran Dagang Lokal Peningkatan Citra Produk Ekspor Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	:	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	643,876,800 643,876,800 117,510,900 311,450,000 53,541,500 161,374,400	APBD

PERSK NEDLA KEPALA DENAS PERINDI STRIAN DAN PERSE GANGAN

NIP NETTER BENEF 1006

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PERTAMA KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

> FAJAR SETRAWAN, SE, MM 19830304 200112 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM

Jabatan

: Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: RICHARD ARNALDO SE., M.SA

Jabatan

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK KEDUA, KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

RICHARD ARNALDO SE., M.SA

NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA, KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM NIP. 19770405 200212 1 009

No		SASARAN		INDIKATOR PROGRAM		TARGET
(1)		(2)		(3)		(4)
1	-	Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	-	Persentase rekomendasi SIUP B2,/MB-Gol.B /MB Gol. C	-	100%
	Keg.	Terlaksananya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar,	-	Jumlah Dokumen Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer	-	1 Dokumen
	Sub.keg	Terlaksananya Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	9	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan		1 Dokumen
2	-	Terlaksananya Sarana Distribusi Perdagangan	-	Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	-	100%
	Keg.	Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	.1.	Jumiah Dokumen fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan	-	1 Dokumen
		Terlaksunanya Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi	-	1 Laporan
	Sub.keg	Terlaksananya Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	-	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang	-	2 Orang
3	-	Tercapai Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok	-	100%
	Keg.	Terlaksananya Kegiatan penjaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	-	Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di		I Dokumen
	Sub.keg	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub	-	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan	-	4 Laporan
	Sub.keg	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub	10	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting	,	4 Laporan
	Keg.	Terlaksananya Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	-	Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag	,	1 Dokumen
	Sub.keg	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku	-	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang		4 Laporan
	Sub.keg	Terlaksananya Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga		6 Laporan
	Keg.	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	1	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi		100 %
	Sub.keg	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	-	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi		1 Laporan
4	-	Terlaksananya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-	Persentase promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terfasihtasi	-	20%
		Terlaksananya Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		1 Laporan
		Terlaksananya Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	-	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri		1 Laporan
		Terlaksananya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	+	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	25 UMKM
	Sub.keg	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam		1 Laporan

Program			Angg	aran	Keterangan
1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	=	Rp.	72,809,100	APBD
Keg.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan		Rp.	72,809,100	
Sub.keg	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	=	Rp.	72,809,100	

2.		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	**	Rp.	170,080,450	APBD
	Keg.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi	-	Rp.	170,080,450	
		Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional	100	Rp.	81,132,450	
		Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang	-	Rp.	88,948,000	
3.		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Rp.	3,009,921,500	APBD
	Keg.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok		Rp.	150,468,350	
	Sub.keg		-	Rp.	91,075,450	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting		Rp.	59,392,900	
	Keg.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok	-	Rp.	2,753,345,350	
	00000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	940	Rp.	925,258,650	
		Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan	100	Rp.	1,828,086,700	
	Keg.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah	***	Rp.	106,107,800	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk	-	Rp.	106,107,800	
4.		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Rp.	280,974,900	APBD
	Keg.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam	200	Rp.	182,295,650	
	Sub.keg	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		Rp.	182,295,650	
	Keg.	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam	300	Rp.	98,679,250	
		Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam	**	Rp.	98,679,250	

PIMAK KEDDA KEPALA BIDAS PERINDUSTRAN DAN RICHARD ARNALDO, SE., MSA NIP. 19821123 200604 1 006

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PERTAMA KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

DONNY IWAN SETIAWAN, ST, MM Nip. 19770405 200212 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIDWAN, M, ST, MM

Jabatan : Kepala Seksi Industri Kemasan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAPIT TOLLA, SE

Jabatan : Plt. Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2023

PIHAK KEDUA, PLT.KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SELAWESI TENGAH

> HAPTE COEEA SE NIP. 19731121 200701 1 009

PIHAK PERTAMA, KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK PANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

> RIDWAN, M, ST, MM NIP. 19680721 201112 1 001

	SASARAN		INDIKATOR		TARGET
(2)		(3)			(4)
Keg.	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah layanan bagi Pelaku IKM		959 IKM
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		2 Dokumen
		Keg. Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sub Keg. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	Keg. Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sub Keg. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	Keg. Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evahuasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sub Keg. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Perara	Keg. Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sub Keg. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan

Kegiatan

Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sub Keg. 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

PIHAK KEDUA Pit.kepala UPTO pengembangan produk industri pangan dan

HAPIT TOLLA, SE Nip. 19731121 200701 1 009

DAN PERDA

Anggaran

Keterangan

Rp662,537,158

Palu, 13 Februari

PIHAK PETAMA Kepala Seksi Industri Kemasan Dan Kerajinan Daerah

RIDWAN, M,ST,MM Nip. 19680721 201112 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: VERADIAN SAPHIRE, SP, MM

Jabatan

: Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: HAPIT TOLLA.SE

Jabatan

: Plt. Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2023

PIHAK KEDUA, PLT.KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINST SULAWEST TENGAH

> BAPTE FOLLA, SE NIP. 19731121 200701 1 009

PIHAK PERTAMA, KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK PANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

VERADIAN SAPHIRE, SP, MM

No		SASARAN		INDIKATOR		TARGET
(1)		(2)		(3)		(4)
	Keg.	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	*	Jumlah layanan bagi Pelaku IKM	-	959 IKM
	Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakst		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	2 Dokumen

Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Keterangan

Sub Keg. 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

MARITTOLIA SE NID 19781121 200701 1 009

Rp340,804,540

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PETAMA Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan

VERADIAN SAPHIRE, SP, MM Nip. 19750319 199603 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: HAPIT TOLLA, SE

Jabatan

: Kepala Tata Usaha UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: HAPIT TOLLA, SE

Jabatan

: PLT. Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2023

PIHAK KEDUA. PLT.KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SEAAWEST TENGAH

NAS PERIND

NIP. 19731121 200701 1 009

PIHAK PERTAMA, KEPALA TATA USAHA KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

> HAPIT TOLLA, SE NIP. 19731121 200701 1 009

No		SASARAN		INDIKATOR		TARGET
(1)		(2)		(3)		(4)
	Keg.	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perungkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Keuangan	-	1 Dokumen
	Sub Keg.	Torlaksananya Ponyedisan Administrasi Polaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen
	Keg.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	-	1 Dokumen
			4	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		1 Iaporan
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Kempenen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pencrangan Hangunan Kantor yang Disediakan	-	2 Paket
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pakut Puralatan dan Porlongkapan Kantor yang Disodiakan		2 Paket
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*	Jumlah Paket Barung Cetakan dan Penggundaan yang Disediakan		1 Paket
	Sub Keg.	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu	7	Jumlah Laporan Ponyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	*	1 Laporan
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggara Rapat Koordinani dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Fanilitasi Konjungan Tamu	0	1 Laporun
	Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daecah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawalan		1 Dokumen
			14	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Llaporan
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2 Laporan
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Uman Kantor yang Disodiakan		1 Laporan
ı	Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-	Jumlah dokumen ketatamahaan dan kepegawalan		1 Dokumen
				Jumlah Isporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 laporus
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Percerangan Dinas atau Kendaraan Diras Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipulihara dan Dibayarkan Pajaknya		8 Unit
	Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Laimnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		35 Unit

	Kegiatan Pelakannaan Pengujian dan Sertifikasi	Anggaran	Keterangan
	Mutu Produk di Seluruh Duerah Kabupaten/Kota		
Keg. Sub Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelakannan Tugas ASN	Rp635,160,000	
Neg.	Administrasi Unsum Perangkat Daerah		
Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4,140,000	
Sub Keg.	Penyedinan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp47,010,100	
Sub Keg. Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi kunjungan tamu	Rp12,286,500 Rp11,640,000	
Sub Keg.	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp14,700,000	
Keg.	Penyediaan Jasa Pemmjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kog.	Penyudiaan Jasa Komunikssi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp164,635,970	
Sub Keg.	Penyedinan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp4,200,000	
Keg.	Pemeliharaan Harang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Keg.	Punyediana Jasa Pomeliharnan, Biaya Pomeliharana dan Pajak Kendarana Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Rp75,000,000	
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp28,900,000	

Palu, 13 Februari 2023

PHIAK PETAMA Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan

HAPIT TOLLA, SE Nop. 19731121 200701 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama RIDWAN N.ALLSE

Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Barang Dan Jasa, Tertib, Niaga Dan Penegakkan Hukum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama DEDDY SUARMAN, SE., MM

Jabatan Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kineria dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2023

PIHAK KEDUA. KEPALA UPTO PELAKSANAAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSISLICAWEST TENGAH

AS PERINDUSTRIA

DEDDY SUARMAN, SE., MM NIP, 19691109 199903 1 006

PIHAK PERTAMA, KEPALA SEKSI PENGAWASAN BARANG DAN JASA, TERTIB, NIAGA DAN PENEGAKKAN HUKUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NIP. 19780531 200212 1 003

No		SASARAN		INDIKATOR		TARGET
(1)		(2)		(3)		(4)
	Keg.	Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Iaporan barang beredar yang diawasi sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	-	1 Laporan
	Sub Keg.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	-	2 Laporan
	Sub Keg.	Terlaksananya Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	-	Jumlah Kasus yang Ditangani	-	4 Kasus

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Keg. 1 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan

Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen

PIHAK KEDUA

Kepala UPTO Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlandungan Konsumen NAS PERINDUSTRIAN

DEDBY SUARMAN, SE. MM Nip. 19691109 199903 1 006

Anggaran

Keterangan

Rp163,707,350

Rp163,707,800

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PETAMA

Kepala Seksi Pengawasan Barung Dan Jasa, Tertib, Niaga Dan Penegakkan Hukum

RIDWAN N.ALI.SE

Nip. ¥9780531 200212 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

: PURWATA,SE Nama

: Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen Jabatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DEDDY SUARMAN, SE., MM

: Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen Jabatan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2023

PIHAK KEDUA, KEPALA UPTD PELAKSANAAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI YENGAH

DEDDY SEARMAN, SE., MM NIP. 19691109 199903 1 006

PIHAK PERTAMA. KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NIP. 19710610 199103 1 005

No		SASARAN		INDIKATOR		TARGET
(1)		(2)	(3)		(4)	
	Keg.	Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Sehiruh Duerah Kabupaten Kota	-	Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen	-	1 Laporan
	Sub Keg.	Terlaksananya Pemberdayaan Konsumen dan Kolombagsan Perlindungan Konsumen	-	Jumah Badan Ponyolesaian Sengketa Konsumon (BPSK) yang Aktif	-	4 BPSK
	Sub Keg.	Terlaksananya Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlashingan Konsumen	-	hunlah Lembaga Perhindungan Kensumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	-	1 LPKSM
	Sub Keg.	Terlaksananyu Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengkota Konsumen	-	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	-	16 Pengadaan

		Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Sehiruh Daerah Kabupaten Kota	Anggaran	Keterangan
Sub Keg.	1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Rp905,036,100	
	2	Peningkatan Hobungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Kensumen	Rp120,415,000	
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Rp101,963,900	

PIHAK KEDUA Kepala UPTB Pelaksanaan Tek

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PETAMA Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen

> PURWATA,SE Nip. 19710610 199103 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama INDRIYANI, SE

Jabatan Kepala Tata Usaha UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

DEDDY SUARMAN, SE., MM Nama

Jabatan : Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2023

PIHAK KEDUA, KEPALA UPTD PELAKSANAAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

STARMAN, SE., MM NIP. 19691109 199903 1 006

PIHAK PERTAMA, KEPALA TATA USAHA UPTD PELAKSANAAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

l	SASARAN		INDIKATOR		TARGET	
(2)		(3)		(4)		
	Keg.	Terlakaananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Juniah Dukumen Keusngan	-	1 Dokumen
	Sub Keg.	Terlakaananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dekumen
İ	Keg.	Terlaksananys Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		1 Dokumen
l				Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		1 laporan
l	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	*	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 Paket
I	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang. Disediakan		1 Paket
l	Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konaultasi SKPD		1 Laporan
l	Keg.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	*	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		1 Dokumen
l				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Iaporan
l	Sub Keg.	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Laporan
ŀ	Keg	lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	-	1 Dokumen
١				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 laporan
I	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Pernyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan
I	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5	
I	Keg	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	-	1 Dokumen
I			-	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Iaporan
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit
l	Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	5 Unit

	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Anggaran	Keterangan
Sub Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp251,160,000	
Sub Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp32,434,240	
Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp1,583,800	
Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp15,870,000	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Sub Keg.

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Kepala PTD Petaksaman Teknis

Pengawasan Dan Perlindungan Monsumen DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DEDDY SUARMAN SE, MM

Nip. 19691109 199903 1 006

*

Jabatan

Sub Keg

Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp66,968,875

Rp1,500,000

Rp2,356,900

Rp32,760,000

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PETAMA Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan

> INDRIYANI, SE Nip. 19711018 199202 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LEVIANA MANGOPO, ST

Jabatan : Kepala Seksi Kalibrasi

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM Jabatan : Kepala UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PERTAMA, KEPALA SEKSI KALIBRASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

LEVIANA MANGOPO, ST NIP. 19851031 201101 2 006

DAN PERDAGANGAN

KEPALA UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI

MUTU BARANG PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

PROVINSASULA WESI TENGAH

PIHAK KEDUA,

FITRI ROSMALA DEWLMASTURA, S.Sos., MM NIP. 19780420 201001 2 005

No	SASARAN		INDIKATOR			TARGET	
(1)	(2)		(3)		+	(4)	
	Keg.	Terlaksananya Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Sekuruh Daerah Kabupaten/Kata		Jadeha Kepumun Maryurskat	-	77 Studelie	
		P 1 1 19	-	Sadelis Kinorja PSMS	-	3 Sudeba	
Ī	Sub Keg.	Torlakamanya Pangumbangan Layatan Sertifikan	-	Sandah Soridikat Produk yang Disorbitkan	-	2 Sertificat	
	Sub K.eg.	Toriaksananya Pangombangan Layanan Kalibeasi		Junish Sortifikat Kalibrasi yang Diterbidian	-	150 Sortificat	

THE ROSMALA DEST MASTER AS MY

Pals, 13 Februari 2023

PIHAK PETAMA Jepala Seksi Kalibras

LEVIANA MANGOPO, ST Nip. 19828031 201101 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIDYAWATI, S.Pt

Jabatan : Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM Jabatan : Kepala UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2023

PIHAK KEDUA, KEPALA UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM NIP. 19780420 201001 2 005

SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA,

KEPALA SEKSI PENGUJIAN DAN

NIP. 19750607 200112 2 004

SASARAN		INDIKATOR			TARGET		
(2)			(3)		(4)		
leg.	Terlaksananya Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	Indeks Kepuasan Masyarakat		77 Indeks		
		-	Indeks Kinerja PSMB		3 Indeks		
ab Keg.	Terlaksananya Verifikasi Mutu Produk		Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau		3 Komoditi		
ib Keg.	Tertaksananya Pengembangan Layanan Pengujian		Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang		1 Dokumen		
	b Keg.	eg. Terlaksananya Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota b Keg. Terlaksananya Verifikasi Mutu Produk b Keg. Terlaksananya Pengembangan Layanan	eg. Terlaksananya Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota - b Keg. Terlaksananya Verifikasi Mutu Produk - Terlaksananya Pengembangan Layanan	eg. Terlaksananya Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota - Indeks Kepuasan Masyarakat - Indeks Kinerja PSMB b Keg. Terlaksananya Verifikasi Mutu Produk - Junlah Komediti Potensial yang Dipantau b Keg. Terlaksananya Pengembangan Layanan - Indeks Kinerja PSMB	eg. Terlaksananya Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Muru Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota - Indeks Kepuasan Masyarakat - Indeks Kinerja PSMB - Indeks Kinerja PSMB - Deksananya Verifikasi Mutu Produk - Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau - Deksananya Pengembangan Layanan - Indeks Kinerja PSMB		

Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Keg. 1 Verifikasi Mutu Produk 2 Pengembangan Layanan Pengujian

Anggaran

Keterangan

Rp140,645,300 Rp174,769,222

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PETAMA Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

WIDYAWATI, S.Pt

PHAK KEDUA

Kepala UPT Pengujian Sertifikasi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PETRUS KRISTOPORUS, S.KOM

Jabatan : Plt. Kepala Tata Usaha UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM Jabatan : Kepala UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2023

PIHAK KEDUA, KEPALA UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSISULAWEST TENGAH

FIFTI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM NIP. 19780420 201001 2 005

PIHAK PERTAMA, PLT.KEPALA TATA USAHA UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

> PETRUS KRISTOPORUS, S.KOM NIP. 19721214 201408 1 001

		SASARAN		INDIKATOR	TARGET	
(2)			(3)	(4)		
	Keg.	Terlakaananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	,	Persentase Realisasi Anggurun		90%
	Sub Keg.	Terlakaananya Penyediaan Administrasi Pelakaanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelakansan Tugas ASN		1 Dokumen
İ	Keg.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Jumlah dokumen ketataunahaan dan kepegawaian	-	1 Dokumen
I			3	Jumish Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	-	1 Isporan
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyodiaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumiah Paket Komponen Instalani Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disedukan	-	1 Paket
I	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(4)	1 Paket
ĺ	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disedukan	-	1 Paket
ĺ	Sub Kog.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Junish Lapocan Ponyclonggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan
Ì	Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	-	1 Dokumen
Ì			-	Jumiah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		laporan
İ	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan
ı	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyodiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan
I	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan
I	Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		1 Dokumen
ĺ				Jumlah Iaporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	laporan
ı	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jahatan yang Dipolihara dan	-	4 Unit
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipolihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit
ı	Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Junish Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	7 Unit

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi		
	Mutu Produk di Seluruh Daerah		
	Kabupaten/Kota		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas		
	ASN	Rp329,760,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi	D-1077060	
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp3,237,250	
Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Rp51,028,190	
	Kantor		
Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp27,055,150	
Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		
	Konsultasi SKPD	Rp83,036,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		
	Pemerintahan Daerah		
Sub Kog.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp12,348,000	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Rp168,737,496	
	Air dan Listrik		
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp50,365,200	

Pennitharam Barang Affilk Darrah Pennijang Urusan Pemerintahan Darrah Sink Krap Penyediaan Jasa Pemeliharaan Hiaya Pemeliharaan dan Pajak Jisudaraan Derotengan Dinas atau Jisudaraan Hinas Jahasin Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Hiaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Hiaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertentaan Kendaraan Dinas Uperatonal atau Lapangan Pemeliharaan Perataun dan Ataun Labunya Hp4,182,000 Sub Kree Rp47,930,000 Sith King. 11649,1100,000 Kupala 1974 Pergujian Noristingal) Pulu, 13 Februari 2023 FHIAK PETAMA PH. Kepala Sub Bagian Fila Usaka UPT Fengujian Serijinkasi Mutu Baran ETTRI HOSMALA REWI MASTURA, 28308., MM Ng. 19780420 201801 Polit PETROS KRUSTOPORUS, S.KOM Nip 19721214 201408 1 001

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

: ANDI EKA MUSDAR, S.IP

Jabatan Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE

Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

tanggung jawab kami. dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

13 Februari 2023

DAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PLT. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI PIHAK PERTAMA,

DAN PERDAGANGAN
DAN PERDAGANGAN SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN

PIHAK KEDUA,

ANDI EKA MUSDAR, S.IP NIP. 19920102 201507 1 001



HI. MAHNILA JOTOLEMBAH, SE NIP. 19661028 199203 2 010

o		SASARAN		INDIKATOR	TARGET		
1)	(2)		_	(3)		(4)	
	Keg.	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen SKM		1 Dokumen	
	Sub Keg.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Perdataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4 Dokumen	
	Sub Keg.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		16 Orung	
	Sub Keg.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sossalisasi Peraturan Perundang-Undangan		42 Orang	
	Keg.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		1 Dokumen	
			-	Jumlah Laporan Penyediaan		1 Laporan	
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang	*	4 Paket	
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	-	4 Paket	
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*	12 Dokumen	
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		75 Laporan	
	Keg.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen keratausahaan dan kepegawaian	,	1 Dokumen	
_			-	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik		1 Laporan	
	Sub Keg.	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	15 Unit	
	Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	-	1 Dokumen	
			-	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang	-	1 Laporan	
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat		Jumlah laporan Penyechaan Jasa surat menyurat	-	13 Laporan	
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah dokumen ketatausahaan dan	-	4 Laporan	
	Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		kepegawaian		1 Dokumen	
				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik		1 Laporan	
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		35 Unit	
Ī	Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Laimnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		115 Unit	
	Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Laimya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantov atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi		1 Unit	

		Kegiatan	Anggaran	Keterangan
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi		
		Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Keg.	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	D-20 660 000	
		Kepegawaian	Rp28,650,000	
	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Rp146,936,000	
		Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Кр140,930,000	
	-3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp6,600,000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Keg.	1	Penyediaan Komponen Instalasi	Rp12,911,296	
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp12,911,290	
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp181,421,759	
	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp60,369,800	
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Rp50,400,000	
		Perundang- undangan	Kp30,400,000	
	5		Rp222,995,000	
		Konsultasi SKPD	NPEZZ, 225,000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah		
	70	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Keg.	-1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp297,798,369	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		
	(4)	Pemerintahan Daerah		
Sub Keg.	1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp300,000	
Sub Keg.	2	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	Rp521,940,400	
	100	Air dan Listrik		
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Keg.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Keg.	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		
		Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Rp211,984,300	
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	aspectation and	
		Jabatan	W 474 (00 000	
Sub Keg.	2	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	Rp126,600,000	
Sub Keg.	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	P. 15 000 000	
		Prasarana	Rp15,000,000	
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PETAMA Pit. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum

ANDI EKA MUSDAR, S.IP Nip. 19920102 201507 1 001

PIHAK KEDUA Sekretaris Dinas Perindustrian Dan

HI. MAHNILA 3 PPOLEMBAH, SE Nip. 19661028 199203 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: NURDIANA, SE, MM

Jabatan

: Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Asset

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE

Jabatan

: Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA, SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

> Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH, SE NIP. 19661028 199203 2 010

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PERTAMA, KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NIP. 19731202 200212 2 004

No.	SASARAN		INDIKATOR		TARGET	
(1)		(3)		(3)	(4)	
	Keg.	Terlahaannaya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Dasrah		Jumlah Dokumen Kenangan	-	1 Dokumen
	Sub Keg.	Turlaksananya Punyedisan Onji dan Tunjangan ASN	-	Juniah Crong yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		120 orang/haban
	Sub Keg.	Terlaksamanya Penyediaan administrasquelaksamaan tugas ASN	-	Aumlah dokumen basil penyedasan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-	I Dokumun
	Sub Keg.	Terlaksaranya Pelaksarana Peratamuhana dan Pengajian Verifikasi Kesangan SKPD		Jundah Dokumen Penatassahaan dan Pengujum/Verifikasi Kasangan SKPD	-	500 Dokiman
	Sub Keg.	Turlaksamunya Koordinani dan Pulsksamun Akantanai SKPD	-	Jumbh Dokumus Hasd Koordinus dan Pelaksanasi Akuntarsi SEPD	-	12 Dokumen
	Sub Keg.	Turlaksanunya Koordinasi dan Penyasunun Laponan Kouangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporen Kroargan Akhir Tahun SKPD dan Laporen Hasil Koordinasi Penyumunu Laporen Kroargan Akhir Tahun SKPD		1.5 Laponer
	Sub Keg.	Terlaksananya Pengelelaan dan Penyiapan Bahan Tangguput Pemeriksaan	-	Anniah Dokumen Bahari Tanggupan Pemerikaans dan Tindak Laujut Pemerikaan	-	5 Dokumon
	Sub Keg.	Terfaksanunya Keerdinasi dan Penyusunan Lapoeni Keuangan Bularun/Triwulanan/Samas terasi SKPD	-	Aenlah Laperan Kesangan Bularan Trasilanan Temesteran SKPD das Laperan Kecelinas Puryasunan Laperan Kesangan Bulaman Trisvularan Semesteran SKPD		14 Laporan
	Sub Keg.	Terlakamanya Penyasunan Pelapunan dan Analasa Prognosa Realisasi Anggaran	-	Junish Dokumen Pelaporan dan Analisis Programii Raeliassi Anggaran	-	1 Dokumes
	Keg.	Terlaksananya Administrasi Baraug Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	Jumlah Laporan Pengrioisan Barang Milik Daerah	-	14 Laporan
	Sub Keg.	Terfaksananya Pengamanan Danung Milik Daerah SKPD	-	Jumlah Dokumen Pengemasus Barang Milik Daerah SICPD	-	10 Dokumen
	Sub Keg.	Torlaksanarya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengerdalian Barung Milik Doerah pada SKPD		Renlah Laporan Hasil Pumbasasa, Pengawasara, dan Pengandalan Burang Milik Daerah pada SKPD		1 Сарогно.
	Sub Keg.	Terlaknarsanya Rekoosalimi dan Panyusuman Laporan Barang Milik Duscah pada SKFD	-	Juniah Laporan Rekonsilani shin Penyawanan Laporan Barang Milik Dawah pada SKPD		2 Lagrens
	Sub Keg.	Terlaksaranya Penatausahaan Darang Milik Danrah pada SKPD	-	Furnish Lapovan Penatsonolusan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Lapones

_			Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Consti	
		a Kegiatan Administrasi	Anggaran	Keterangan
Sub Keg.		rungkat Dueruk aji dan Tunjangan ASN	Rp11,504,619,643	
Sub Keg.	2 Penyediaan ad ASN	hninistrasijolaksamaan tugaa	Rp1,239,000,000	
	3 Pelaksmaan P	enatausahaan dan ifikasi Keuangan SKPD	Rp321,030,000	
	4 Koordinasi da SKPD	n Pelaksanaan Akuntanai	Rp72,053,800	
	Kesangan Akt	n Penyususun Laporan ar Tahun SKPD	Rp53,257,550	
	Tanggapan Per		Rg62,009,100	
		o Penyusunan Laponso anan Triwulanan Semes teran	Rp67,037,800	
	8 Penyusianan Pe Prognosis Real	elaporan dan Analisis Isasi Anggaran	Rp56,060,000	
	Administrasi Perangkat Da	Barang Milik Duerah pada erah		
Sub Keg		tarang Milik Daerah SKPD	Rp93,110,000	
		ngawasan, dan Pongendalian Sarrah pada SKPD	Rp65,177,080	
	3 Rekonsiliusi da	n Penyasunan Laponan baruh pada SKFD	Rp31,624,950	
	STUD	Barang Milik Duerah pada	Rp63,214,000	
	1/3	TAM PROVIDE	Palu. 13 Februari 2023	
	18	135		
	12/ P	THAK KEDUA	PIHAK PETAMA	
		inas Perindustrian Dan erchigangan	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan	Asset
	NIG I	AEW CTICH	0 1	
	(* DA	-	1201	
	11	14/1/10 / "	/ ///va/L	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROY EDWARD KUMAAT, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

: Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE Nama

Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PERTAMA. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

> ROY EDWARD KUMAAT, SE NIP. 19820321 200904 1 004

Hj. MAHNEA JOTOLEMBAH, SE NIP. 19661028 199203 2 010

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN DINAS

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN			INDIKATOR		TARGET	
(1)	(2)		(3)			(4)	
	Keg.	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	-	1 Dokumen	
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 Dokumen	
	Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	1 Dokumen	
	Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1 Dokumen	
	Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	Jumiah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	-	1 Dokumen	
	Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1 Dokumen	
	Sub Keg.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan	

		Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Anggaran	Keterangar
Sub Keg.	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp561,738,000	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp12,825,000	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp7,350,000	
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp5,725,100	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp3,750,200	
	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp124,279,700	

Sekretaris Dinas Perindustrian Ban Perdagangan

Hi MAHNIDA JOTOLEMBAH, SE Nip 19661028 199203 2 010

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PETAMA Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program

Nip. 19820321 200904 1 004